

TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DENGAN DESENTRALISASI FISKAL SEBAGAI VARIABEL *MODERATING* KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN

Sopiyan A.R¹, Yuli Antina Aryani², Dessy Utami³, Firmansyah⁴, Periansya^{5*}

¹⁻⁶Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email: periansya@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui kemandirian keuangan daerah dengan Desentralisasi Fiskal selaku Variabel Moderating. Dalam pelaksanaan penelitian ini memakai metode yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling* dengan *Sampling total*. Dalam analisis menggunakan regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Desentralisasi Fiskal pengaruh signifikan dan Desentralisasi Fiskal bisa memoderasi antara Pajak Daerah terhadap. Berikutnya Dana alokasi umum, Belanja Pegawai tidak berpengaruh signifikan serta Desentralisasi Fiskal tidak dapat memoderasi secara parsial antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dari Penelitian ini diketahui jika analisis dilakukan secara bersama-sama diketahui Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, serta Belanja Pegawai berpengaruh signifikan dan Desentralisasi Fiskal secara simultan dapat memoderasi ikatan antar pajak daerah, dana alokasi universal dan belanja pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Kata Kunci : Kemandirian Keuangan Daerah, Pajak Daerah, Desentralisasi Fiskal.

Abstract

This research was conducted in order to determine the regional financial independence with Fiscal Decentralization as the Moderating Variable. In carrying out this research, the method used is Nonprobability Sampling with Total Sampling. In the analysis using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). From the results of the study, it is known that the level of regional financial independence is partially affected by regional taxes, Fiscal Decentralization has a significant influence and Fiscal Decentralization can moderate regional taxes. Next, General Allocation Funds, Personnel Expenditures have no significant effect and Fiscal Decentralization cannot partially moderate the General Allocation Funds and Personnel Expenditures on the Level of Regional Financial Independence. From this study it is known that if the analysis is carried out jointly, it is known that Regional Taxes, General Allocation Funds, and Personnel Expenditures have a significant effect and Fiscal Decentralization can simultaneously moderate the bond between local taxes, funds

Keywords : *Level of Regional Finance Independence, Local Tax, Fiscal Decentralization.*

1. PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah sebagai solusi dari bentuk pemerintahan sentralistik yang dinilai telah menimbulkan dependensi tinggi terhadap pemerintah pusat (Purnima, Saleh, & Noor, 2015). Guna mendorong pelayanan pemerintahan, pemerintah

pusat mengubah kebijakannya dari sentralistik menjadi desentralisasi. Salah satu cara peningkatan potensi ekonomi daerah dapat melalui desentralisasi fiskal. Perwujudan kebijakan desentralisasi tersebut dengan adanya otonomi daerah yang terdiri atas hak,

kewajiban, serta tanggung dan wewenang yang diberikan pusat untuk mengurus daerahnya masing-masing atas dasar peraturan yang berlaku.

Suatu daerah dapat dilihat Kemandiriannya dari kemampuan sumber daya keuangan daerah sebagai wujud pembangunan daerah. Jika daerah itu mempunyai sumber pendapatan asli daerah dalam mendanai pengeluarannya, dikatakan memiliki kemandirian yang baik dan apabila tingkat kemandiriannya rendah maka ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan luar semakin tinggi. Kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah dimasukkan di dalam APBD yang merefleksikan kemampuan dalam mengelola keuangan pemerintahan” (Periansya,2019).

Dalam menghitung rasio kemandirian dapat di perbandingkan antara jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menggunakan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi termasuk pinjaman daerah (Mahmudi,2011). Apabila daerah tersebut mempunyai sumber pendapatan asli daerah untuk

mendanai pengeluarannya, Jika tingkat kemandirian bertambah tinggi, maka ketergantungan pemerintah daerah akan semakin rendah pada bantuan luar. Secara umum tren pendapatan menunjukkan kenaikan pendapatan baik di kota maupun kabupaten setiap tahunnya, tetapi kemampuan keuangannya masih mengalami fluktuasi naik turun. Salah satu penyebabnya akibat adanya ketergantungan daerah atas kecendrungan rendahnya PAD dilain pihak transfer pusat yang besar, yang berakibat terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD).

Fenomena ini terlihat pada Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Selatan di tahun 2019 yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat ketimbang mengoptimalkan PAD. Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah masih kecil serta masih bergantung pada pendapatan tranfer dari pemerintah pusat guna membiayai pengeluarannya dalam menjalankan berbagai program serta kegiatan pembangunannya.

Tabel 1
Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemandirian	Kemampuan Keuangan
Kota Palembang	39,53 %	Rendah
Kabupaten Muara Enim	12,81 %	Rendah Sekali
Kota Lubuk Linggau	11,22 %	Rendah Sekali
Kabupaten Banyuasin	10,92 %	Rendah Sekali
Kabupaten Ogan Komering Ilir	10,47 %	Rendah Sekali
Kabupaten Ogan Komering Ulu	10,35 %	Rendah Sekali
Kota Prabumulih	9,24 %	Rendah Sekali
Kabupaten Musi Banyuasin	8,68 %	Rendah Sekali
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	8,14 %	Rendah Sekali
Kota Pagar Alam	7,89 %	Rendah Sekali
Kabupaten Musi Rawas	7,39 %	Rendah Sekali
Kabupaten Lahat	6,81 %	Rendah Sekali
Kabupaten Ogan Ilir	6,67 %	Rendah Sekali
Kabupaten OKU Timur	5,86 %	Rendah Sekali
Kabupaten Empat Lawang	4,97 %	Rendah Sekali
Kabupaten OKU Selatan	4,48 %	Rendah Sekali
Kabupaten Musi Rawas Utara	3,96 %	Rendah Sekali

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan KKD pada tahun 2019 pada tabel 1 diatas diketahui hanya 1 termasuk pada katagori rendah yaitu kota Palembang sedangkan 16 kemampuan keuangan kota/Kabupaten lainnya memperlihatkan tingkat kemampuan keuangan daerah yang rendah sekali dengan tingkat kemandirian dibawah angka 12.81 %. Dari informasi ini menjelaskan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah rata-rata belum mandiri karena termasuk dalam kriteria rendah sekali dan masih tinggi ketergantungan pemerintah daerah pada pendapatan transfer dalam membiayai kegiatan pemerintahannya.

Penelitian sebelumnya (Periansya, 2019) menggambarkan dana alokasi umum berpengaruh dengan secara positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan (Wahyuni & Ardini, 2018) yang juga meneliti tentang kemandirian keuangan daerah memberikan hasil bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh negatif

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Peneliti lain (Purnima et al., 2015) mengungkapkan “desentralisasi fiskal dapat memoderasi pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kemandirian fiskal pada kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur”.

Beberapa terlihat hasil yang berbeda satu peneliti dengan peneliti lainnya tentang kemandirian keuangan daerah sehingga peneliti tertarik meneliti lebih lanjut khususnya mengenai pengaruh Pajak Daerah, DAU, Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Desentralisasi Fiskal menjadi Variabel Moderating pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik peneliti sendiri dan dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah di kabupaten kota di Sumatera Selatan termasuk para peneliti lainnya yang ingin meneliti variabel lain lebih lanjut.

2. TELAAH LITERATUR

Teori Keagenan

Teori tentang keagenan ini menyatakan terdapat relasi keagenan atas suatu kontrak dari suatu perjanjian (kontrak) antara pihak utama dan agen, dimana pihak utama memberi kuasa kepada agen dalam pengambilan keputusan atas nama pihak utama (Jensen & Meckling, 1976). Sebagai agen, pemerintah daerah secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pendapatan daerah kepada pemerintah pusat (principal), Tetapi disisi yang lain pemerintah daerah juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka, sehingga dapat memunculkan kemungkinan besar agen tidak selalu menjalankan dan melakukan sistem

Pajak Daerah

Menurut (Novitasari & Novitasari, 2019) pajak daerah

pemerintahan yang terbaik demi kepentingan principal (Halim & Abdullah, 2016).

Teori *Fiscal Federalism*

Federalisme fiskal menggambarkan suatu pernyataan model normatif dari pemerintahan pusat atas keinginan dari masyarakat dalam mengarahkan terhadap aturan-aturan kelembagaan antar pemerintahan guna terciptanya dan menjamin bahwa lembaga-lembaga pemerintah daerah telah menjalankan aturan seperti kehendak pusat dengan perkiraan sesuai keinginan seluruh rakyat. Pengambilan keputusan terdesentralisasi akan lebih mudah dilakukan jika menggunakan informasi yang sesuai hal ini dikarenakan pemerintah daerah selalu berhubungan dengan masyarakat (Hayek, 1945).

merupakan suatu biaya yang dibebankan pemerintah daerah kepada suatu produk dan pendapatan termasuk atas kegiatan masyarakat dalam batas

teritorialnya. Motif utama pada pungutan atas pajak ini guna membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam suatu wilayah atau negara. Dengan kata lain bahwa pajak daerah merupakan kontribusi secara langsung baik badan atau pribadi yang digunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Dana Alokasi Umum

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menyatakan target dari dialokasikannya dana alokasi umum dimaksud guna meningkatkan penguasaan keuangan antar wilayah serta dipergunakan dalam mendanai kebutuhan daerah sebagai wujud otonomi daerah serta dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adanya Dana alokasi umum (DAU) selain untuk pemerataan kemampuan keuangan setiap daerah juga untuk meminimalkan ketidakseimbangan kemampuan keuangan setiap daerah melalui skema yang telah ditetapkan termasuk mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Belanja Pegawai

Menurut (Defitri, 2020), belanja pegawai merupakan imbalan jasa yang dibayarkan oleh pemerintah atas pekerjaan yang telah dilaksanakan baik gaji ataupun tunjangan yang menjadi kewajiban pemerintah kepada pegawai baik yang telah berstatus ASN ataupun yang belum berstatus ASN sebagai imbalan terhadap pekerjaan yang sudah dijalankan.

Desentralisasi Fiskal

Scara umum desentralisasi mencerminkan adanya transfer kompetensi pusat dan penyerahan

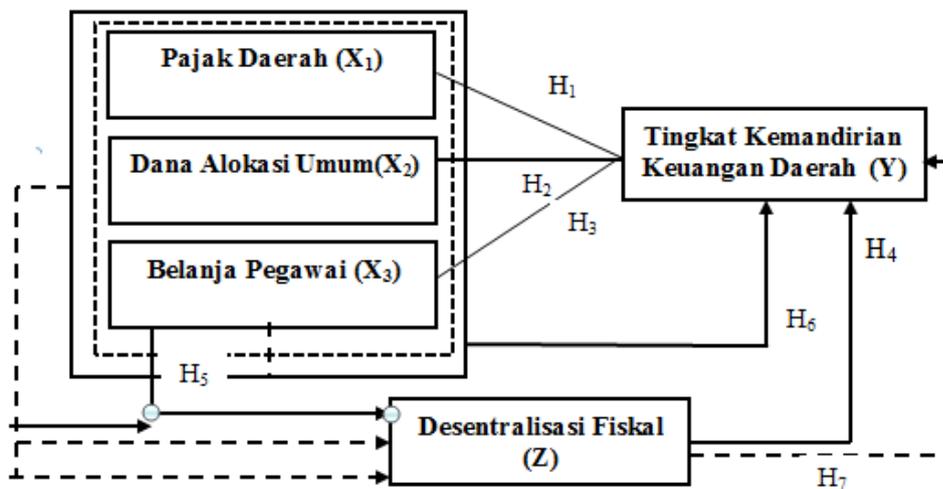
tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban atas fasilitas umum dari pemerintah pusat. Pandangan lain menunjukkan bahwa desentralisasi dimaksud sebagai transfer atas fungsi dan sumber daya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan pada hal fungsi, bahwa peran terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat serta mempunyai spektrum perekonomian yang lebih luas (Kharisma, 2013) .

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapat (Haerunnisa, 2018) bahwa TKKD menjelaskan terhadap ketergantungan daerah atas sumber dana yang berasal dari luar. Begitupun makna dari perbandingan kemandirian keuangan daerah dapat diartikan adanya keterikatan suatu daerah terhadap sumber eksternal. Dengan demikian maka suatu daerah dinyatakan berdikari jika daerah tersebut dapat mendukung urusan pemerintahan dan pembangunannya secara otonom tanpa mengantungkan dana yang berasal dari pemerintah pusat.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teori dan jurnal sebelumnya, kerangka pemikiran diilustrasikan didalam bagan penelitian ini yang menunjukkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan simultan. Hubungan antara variabel independen terhadap variabel moderator secara parsial dan simultan, variabel dependen terhadap variabel moderator secara simultan sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Menurut (Sugiono, 2019), Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian. Disebut sementara jawaban tersebut karena baru berlandaskan pada teori yang relevan, dan belum didasari pada hasil telaah yang diperoleh melalui pengumpulan informasi. Dengan demikian maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis atas rumusan masalah penelitian, belum merupakan jawaban yang empiris. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Diduga pengaruh secara parsial Pajak Daerah terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
- H₂ : Diduga terdapat pengaruh secara parsial Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
- H₃ : Diduga terdapatnya pengaruh secara parsial Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
- H₄ : Diduga ada pengaruh secara parsial Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
- H₅ : Diduga adanya pengaruh secara parsial Desentralisasi Fiskal terhadap hubungan antara Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Pegawai

terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

- H₆ : Diprediksi terdapat pengaruh secara simultan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
- H₇ : Diduga ada pengaruh secara simultan Desentralisasi Fiskal terhadap hubungan antara Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

3.METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada riset ini dengan metode kuantitatif dimana jumlah Populasi sebanyak 17 Kabupaten/Kota dalam provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* dimana semua populasi dijadikan sampel (Sugiono, 2019). Data pada penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengambil dari <http://bpk.go.id>. Analisis pada riset ini memakai metode statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda serta memanfaatkan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk melihat apakah terdapat moderasi dari variabel yang diteliti serta uji hipotesis. Dalam analisis ini dibantu

dengan program IBM SPSS 25 for windows.

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3,993	1,422		2,809	,006
Pajak Daerah (X1)	1,819	,072	,939	25,118	,000
Dana Alokasi Umum (X2)	-,012	,028	-,016	-,425	,672
Belanja Pegawai (X3)	,024	,034	,028	,713	,478

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Sumber : *Output SPSS 25 (2021)*

Hasil tabel 1 menunjukkan bahwa konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 3,993 + 1,819 X_1 - 0,012 X_2 + 0,024 X_3 + e$$

Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 3
Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	,342	1,311		,261	,795
Pajak Daerah (X1)	-,073	,100	-,038	-,724	,471
Dana Alokasi Umum (X2)	-,008	,034	-,010	-,232	,817
Belanja Pegawai (X3)	-,001	,018	-,001	-,060	,953
Desentralisasi Fiskal (Z)	1,152	,174	,774	6,632	,000
Moderating_1	,019	,004	,291	4,760	,000
Moderating_2	,001	,004	,015	,123	,903
Moderating_3	-,001	,002	-,031	-,389	,698

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : *Output SPSS 25 (2021)*

hasil uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut ini :

$$Y = 0,342 - 0,073X_1 - 0,008X_2 - 0,001X_3 + 1,152Z + 0,019X_1Z + 0,001X_2Z - 0,001X_3Z$$

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4Z + \beta_5X_1Z + \beta_6X_2Z + \beta_7X_3Z + e$$

Koefisien Determinasi (Uji F)

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,950 ^a	,902	,899	2,57500

a. Predictors: (Constant), Belanja Pegawai (X3), Pajak Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2)

Sumber : *Output SPSS 25 (2021)*

Hasil nilai *R Square* sebesar 0,902. menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara variabel dependen dan variabel independen adalah sebesar

0,902. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Pegawai adalah sebesar 90,2%.

Tabel 5
Hasil Uji t
tanpa Variabel *Moderating*
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,993	1,422		2,809	,006
	Pajak Daerah (X1)	1,819	,072	,939	25,118	,000
	Dana Alokasi Umum (X2)	-,012	,028	-,016	-,425	,672
	Belanja Pegawai (X3)	,024	,034	,028	,713	,478

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Sumber : *Output SPSS 25 (2021)*

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan nilai t-hitung dan nilai signifikansi dari tiap variabel independen (Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan

Belanja Pegawai) yang merupakan indikator penerimaan atau penolakan hipotesis.

Tabel 6
Hasil Uji t
dengan Variabel Moderating
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,342	1,311		,261	,795
Pajak Daerah (X1)	-,073	,100	-,038	-,724	,471
Dana Alokasi Umum (X2)	-,008	,034	-,010	-,232	,817
Belanja Pegawai (X3)	-,001	,018	-,001	-,060	,953
Desentralisasi Fiskal (Z)	1,152	,174	,774	6,632	,000
Moderating_1	,019	,004	,291	4,760	,000
Moderating_2	,001	,004	,015	,123	,903
Moderating_3	-,001	,002	-,031	-,389	,698

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : *Output SPSS 25 (2021)*

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Bersumber pada hasil pengujian hipotesis hasil yang diperoleh t-tabel 1,990 (amati pada tabel statistik). Karena nilai t hitung $>$ t tabel ($25,118 > 1,990$). Nilai signifikan (sig) $0.000 < 0.05$ maka dinyatakan variabel independen Pajak Daerah (X1) mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Hasil ini selaras temuan (Novita, 2012), ((Haerunnisa, 2018) . bersumber pada teori Keynes, menata perekonomian pada suatu wilayah bisa dilakukan dengan campur tangan pemerintah daerah dalam menata keuangan daerahnya (Haerunnisa, 2018).

Salah satu aspek penting yang mempengaruhi pajak daerah merupakan kesadaran masyarakat akan berartinya pembangunan sehingga terlihat terdapatnya pergantian terhadap kenaikan realisasi pendapatan sejak tahun 2015 sampai 2019. Pendapatan pajak daerah yang tinggi ialah salah satu

komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tingginya pendapatan pajak daerah mampu mempengaruhi jumlah PAD, dengan demikian semakin besar kemampuan pendapatan daerah maka akan mempengaruhi pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang tinggi mampu mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga pada kesimpulannya tingkat kemampuan keuangan daerah meningkat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Bersumber pada hasil pengujian diperoleh hasil t-tabel 1,990. Dimana nilai t hitung $<$ t tabel ($-0,425 < 1,990$). Adapun nilai signifikan (sig) $0,672 > 0.05$ sehingga bisa dikatakan jika variabel independen Dana Alokasi Umum (X₂) tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Sejalan dengan riset (Nuro & Widiastoeti, 2019) serta (Nindita &

Rahayu, 2018) yang merumuskan jika dana alokasi umum tidak berpengaruh relevan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tidak terdapatnya pengaruh Dana alokasi umum atas tingkat kemandirian keuangan daerah

Pemanfaatan dana alokasi umum jadi tanggung jawab pemerintah daerah guna menolong membiayai pembangunan daerahnya masing – masing. Dana alokasi umum ialah bagian dari dana Perimbangan sehingga dalam memastikan TKKD di perhitungkan. Dari perhitungan pada tabel di atas terlihat perlu ditingkatkan lagi tingkat kemandirian agar lambat laun ketergantungan daerah tidak terjadi lagi.

Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Bersumber pada pengujian diperoleh t-tabel 1,990. sebab nilai t hitung < t tabel (0,713 < 1,990). Dengan nilai signifikan (sig) 0,478 > 0.05 bisa dinyatakan variabel Belanja Pegawai (X_3) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Perihal ini sama dengan penemuan (Defitri, 2020) , (Wahyuni & Ardini, 2018) yang merumuskan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara belanja pegawai dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dari pengujian terlihat jika nilai belanja pegawai cenderung bertambah serta diketahui juga adanya kecenderungan pemerintah daerah memakai pendapatan daerah yang diterimanya digunakan untuk belanja pegawai daripada digunakan untuk belanja pembangunan. Terlihat di tahun 2019 Belanja Pegawai sebesar Rp1.757.169.664.436,00 lebih besar dari pada belanja modal/pembangunan ialah sebesar Rp1.606,219.507.432,26. Adanya tingkat pengeluaran daerah yang tinggi dapat mempengaruhi keadaan keuangan daerah, dan ini akan memperlambat pembangunan yang pada akhirnya kemandirian keuangan daerah akan sulit tercapai.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Bersumber pada hasil pengujian pada tabel 6, diperoleh hasil jika variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikatakan mempeengaruhi sebab variabel Desentralisasi Fiskal (Z) mempunyai nilai t hitung > tabel (6,632 > 1,990). Nilai signifikan (sig) 0,000 < 0.05, yang berarti bahwa Desentralisasi Fiskal (Z) secara parsial mempengaruhi secara signifikan serta positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y).pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai arti yang terkandung pada UU No. 33 Tahun 2004 bahwa Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang pemerintahan pusat ke pemerintah kepada daerah otonom dalam mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan. Derajat desentralisasi fiskal yang tinggi memperlihatkan pemerintah daerah sanggup dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah dibanding pendapatan lain pada pendapatan daerah. Apabila kepiawaian pendapatan asli daerah tinggi maka dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemakaian dana pusat sehingga Tingkat kemampuan keuangan daerah tinggi serta ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan provinsi terus menjadi rendah.

Pengaruh secara parsial Desentralisasi Fiskal terhadap hubungan antara Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Bersumber pada hasil uji t seperti tampak pada tabel 6 menampilkan bahwa variabel desentralisasi fiskal bisa memoderasi secara parsial antara Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Bisa dikatakan dapat memoderasi sebab hubungan Desentralisasi Fiskal antara Pajak Daerah dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah mempunyai nilai nilai t hitung > t tabel (4,760 > 1,990). Nilai signifikan (sig) 0.000 < 0.05 sehingga bisa dikatakan bahwa Desentralisasi Fiskal secara parsial dapat memoderasi signifikan dan positif antara Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Sedangkan Desentralisasi Fiskal tidak bisa memoderasi secara parsial antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota

di Provinsi Sumatera Selatan. Dapat dikatakan tidak memoderasi sebab hubungan Desentralisasi Fiskal antara Dana Alokasi Umum dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah memiliki nilai t hitung < t tabel (0,123 < 1,990). Nilai signifikan (sig) 0,903 > 0,05 serta hubungan Desentralisasi Fiskal antara Belanja Pegawai dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah memiliki nilai t hitung < t tabel (-0,389 < 1,990). Nilai signifikan (sig) 0,698 > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa Desentralisasi Fiskal secara parsial tidak dapat memoderasi signifikan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Pengaruh secara simultan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil dari pengujian simultan (uji F) pada keseluruhan variabel-variabel independen dalam penelitian ini terlihat pada tabel 7 berikut :

Tabel 7
Hasil Uji Statistik F tanpa Variabel Moderating
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4961,134	3	1653,711	249,405	,000 ^b
	Residual	537,081	81	6,631		
	Total	5498,214	84			

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Belanja Pegawai (X3), Pajak Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2)

Sumber : *Output SPSS 25 (2021)*

Bersumber pada hasil pengujian yang dilakukan oleh periset, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, dana alokasi umum dan belanja pegawai mempengaruhi secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dapat dikatakan mempengaruhi sebab pada uji F dikenal F hitung sebesar 249,405. Hasil yang diperoleh untuk F tabel merupakan sebesar 3,109 (lihat pada

tabel statistik). Karena F hitung > F tabel (249,405 > 3,109). Maka, bisa dinyatakan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum dan belanja pegawai secara bersama-sama berpengaruh positif serta signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hasil uji pada tabel 4 tersebut diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,899. Angka tersebut memperlihatkan bahwa korelasi antara variabel dependen dan variabel

independen adalah sebesar 0,899. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh pajak daerah, dana alokasi umum, serta belanja pegawai adalah sebesar 89,9,2%.

Pengaruh secara simultan Desentralisasi Fiskal terhadap hubungan antara Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 8
Hasil Uji Statistik F dengan Variabel Moderating ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5466,165	7	780,881	1876,101	,000 ^b
	Residual	32,049	77	,416		
	Total	5498,214	84			

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Moderating_3, Dana Alokasi Umum (X2), Belanja Pegawai (X3), Moderating_1, Pajak Daerah (X1), Desentralisasi Fiskal (Z), Moderating_2

Sumber : *Output SPSS 25 (2021)*

Bersumber pada hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil yang menampilkan jika desentralisasi fiskal secara simultan bisa memoderasi hubungan antara pajak daerah, dana alokasi umum serta belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dapat dikatakan berpengaruh sebab pada uji F diketahui F hitung sebesar 1876,101. Hasil yang diperoleh untuk F tabel adalah sebesar 3,109 (amati pada tabel statistik). Sebab F hitung > F tabel ($1876,101 > 3,109$) serta nilai signifikansi pada uji F ($0,000 < 0,05$). Maka, bisa dinyatakan bahwa desentralisasi fiskal terhadap hubungan antara pajak daerah, dana alokasi umum dan belanja pegawai secara simultan mempengaruhi secara signifikan dan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yang artinya desentralisasi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

5. SIMPULAN

Kesimpulan

Bersumber pada hasil serta pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial pajak daerah, serta desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dana alokasi umum dan belanja pegawai tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya dari hasil penelitian ini diketahui variabel desentralisasi fiskal bisa memoderasi antara pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan desentralisasi fiskal tidak bisa memoderasi secara parsial antara dana alokasi umum serta belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan variabel dependen yaitu pajak daerah, dana alokasi umum, serta belanja pegawai berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel independen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemudian untuk variabel moderating secara simultan ialah desentralisasi fiskal dapat memoderasi dan memperkuat hubungan antara variabel independen yaitu pajak daerah,

dana alokasi umum, dan belanja pegawai terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah.

Saran

Pemerintah daerah hendaknya lebih memaksimalkan kemampuan daerahnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah dalam membiayai - pengeluarannya sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat dikurangi.

Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya memperluas lingkup sampel yang diteliti tidak hanya terbatas hanya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan serta dapat menambah variabel lain yang belum diuji di penelitian ini.

6.DAFTAR PUSTAKA

- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, *19(02)*, 107–119.
<https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>
- Haerunnisa. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, *4(002)*, 44–55.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2016). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah, (February).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e, *3*, 305–360.
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi, *14*, 101–119.
- Nindita, N. L., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, *2(1)*, 12–19.
<https://doi.org/10.25124/jaf.v2i1.2098>
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah, *3(2)*, 174–186.
- Nuro, S., & Widiastoeti, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Periode 2012 – 2016, *4(1)*, 1–10.
- Periansya. (2019). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi, *05(02)*, 165–180.
- Purnima, D., Saleh, C., & Noor, I. (2015). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Fiskal dengan Desentralisasi Fiskal sebagai Variabel Moderating di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, *Vol. 3, No. 6*, *3(6)*, 969–975.
- Sugiono. (2019). *statistik untuk penelitian*. Jogyakarta: BPF.
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, *7(6)*, 2–16.
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, *19(02)*, 107–119.
<https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>

- nis.V19i2.476
- Haerunnisa. (2018). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal Of Accounting Taxing And Auditing (Jata)*, 4(002), 44–55.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2016). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah, (February).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure I . Introduction And Summary In This Paper Wc Draw On Recent Progress In The Theory Of (1) Property Rights , Firm . In Addition To Tying Together Elements Of The Theory Of E, 3, 305–360.
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi, 14, 101–119.
- Nindita, N. L., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Serta Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Jaf- Journal Of Accounting And Finance*, 2(1), 12–19.
<https://doi.org/10.25124/jaf.v2i1.2098>
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah, 3(2), 174–186.
- Nuro, S., & Widiastoeti, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Periode 2012 – 2016, 4(1), 1–10.
- Periansya. (2019). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi, 05(02), 165–180.
- Purnima, D., Saleh, C., & Noor, I. (2015). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemandirian Fiskal Dengan Desentralisasi Fiskal Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 6, 3(6), 969–975.
- Sugiono. (2019). *Satistik Untuk Penelitian*. Jogjakarta: BPF.
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, 7(6), 2–16.